

## Persepsi Stakeholder terhadap Fungsi Hutan dalam Upaya Mempertahankan Kawasan Hutan di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan

*(Stakeholder Perceptions of Forest Functions in Supporting Forest Area Conservation in Kuala Tolam Village, Pelalawan Regency)*

Ika Lestari<sup>1\*</sup>, Maryani<sup>1,2</sup>, Anesha Allasselcida<sup>1</sup>, Dinda Tri Agustina<sup>1</sup>, Erwanda Tri Bintan Sabri<sup>1</sup>, Hanifah Ikhsani<sup>1</sup>, Lefdi Agung Nugraha<sup>1</sup> Gandhiko Mohta<sup>1</sup>, Agung Kartika Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293

<sup>2</sup>Siak Pelalawan Landscape Program, Pekanbaru, Riau, 28282

<sup>\*</sup>Email: [ikalestari@lecturer.unri.ac.id](mailto:ikalestari@lecturer.unri.ac.id)

### **Abstract**

**Article History:**

Received: 20 Aug, 2025

Accepted: 19 Nov, 2025

Published: 30 Nov, 2025

**Keywords:**

economy, ecology, social aspect, stakeholder perception, forest function

*Kuala Tolam, a village in Pelalawan, encompasses forest areas and peatland ecosystems that provide important ecological, economic, and social functions for the local community. However, these areas have been experiencing continuous decline and pressure due to industrial activities and land-clearing practices. This condition requires a deeper understanding of stakeholder perceptions of forest functions as an essential foundation for fostering a commitment to preserving and maintaining the remaining forest areas. The purpose of this study is to analyze stakeholder perceptions of forest functions in efforts to maintain forest areas in Kuala Tolam, focusing on three aspects: ecological, economic, and social. The research employed both quantitative and qualitative approaches, as well as interviews with stakeholders who were involved in discussion forums aimed at developing commitments for the protection of forest areas in Kuala Tolam. Results showed that stakeholder perceptions of forest functions in Kuala Tolam fell into the "agree" category across all measured aspects, i.e., ecological, economic, and social. The positive perceptions indicated a collective awareness of the instrumental role forests play in sustaining life, then serving as social capital for building a shared commitment to safeguarding forest functions and areas.*

### **Pendahuluan**

Kabupaten Pelalawan, Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki ekosistem gambut dengan tutupan alam cukup luas di masa lalu. Namun, dalam tiga dekade terakhir, luas hutan di wilayah ini terus menurun secara signifikan akibat ekspansi industri kehutanan, perkebunan kelapa sawit dan pembukaan kanal yang masif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Novarina (2024), hutan alam di Semenanjung Kampar saja mengalami penurunan yang signifikan dari 723.895,30 ha pada tahun 1990 menjadi 433.395,20 ha pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan hanya sebagian kawasan hutan yang tersisa dan umumnya terfragmentasi dalam bentang lahan yang telah terdegradasi.

Kondisi serupa juga terlihat di tingkat desa, salah satunya Desa Kuala Tolam yang masih memiliki sisa kawasan hutan penting bagi keberlanjutan ekosistem gambut. Hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Siak Pelalawan Landscape Program (SPLP) pada tahun 2023 di

Desa Kuala Tolam menunjukkan bahwa desa ini memiliki luas gambut sekitar 28.090,35 ha dengan hutan tersisa seluas 5.163,77 ha. Dari luas tersebut, 5.081 ha berupa lahan gambut dan 82,52 ha berupa lahan mineral, dengan sebagian besar berada di area konservasi perusahaan Hutan Tanaman Industri (SPLP-BRGM, 2023). Sisa kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem penting, seperti pengaturan tata air dan penyimpan karbon, tetapi juga memiliki nilai sosial-ekonomi bagi masyarakat, misalnya sebagai sumber Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa madu sialang. Meski demikian, keberadaan hutan di Kuala Tolam menghadapi berbagai ancaman, baik dari aktivitas internal maupun eksternal desa. Pembangunan kanal yang masif, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, serta tekanan dari aktivitas ekonomi skala besar berpotensi mempercepat degradasi hutan dan gambut (Medrilzam *et.al* 2017).

Sebagai respon terhadap ancaman tersebut, Pemerintah Desa Kuala Tolam telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan gambut dan perlindungan hutan. Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah pembangunan sekat kanal dalam bentuk tata kelola air (*water management*) yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada tahun 2015, yakni berupa bantuan 10 unit sekat kanal. Infrastruktur ini berperan penting dalam mempertahankan kelembaban gambut dengan menahan muka air tanah agar tidak sepenuhnya mengalir ke sungai, sehingga kondisi gambut tetap basah dan risiko kebakaran dapat diminimalkan. Selain itu, keberadaan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga memperkuat kesiapsiagaan desa dalam menghadapi ancaman kebakaran lahan. Di sisi kelembagaan, Desa Kuala Tolam telah menetapkan Peraturan Desa untuk melindungi hutan di area kesepakatan konservasi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) dan masyarakat seluas 1.437,45 ha dan area total hutan sialang seluas 31,98 ha. Langkah ini telah mencerminkan adanya kesadaran dan inisiatif lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan gambut desa. Namun demikian, keberhasilan upaya perlindungan hutan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi atau teknis semata, melainkan juga sangat bergantung pada persepsi para *stakeholder* terhadap fungsi hutan.

Persepsi yang komprehensif, mencakup fungsi ekologi, ekonomi dan sosial, serta dapat membentuk kesadaran kritis masyarakat mengenai pentingnya hutan. Hal ini dapat mengacu pada kajian yang dilakukan oleh Bálíková et al., (2020) terkait *forest–water nexus*, bahwa pemahaman dan opini dari berbagai kelompok *stakeholder* dengan latar pengetahuan, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda berperan krusial dalam rancangan dan keberhasilan skema konservasi hutan dan pengelolaan air. Selain itu, studi lintas-negara tentang persepsi *stakeholder* terhadap jasa ekosistem hutan menegaskan pentingnya mengenali perspektif yang berbeda mulai dari konservasi ekologis, pariwisata budaya, hingga penyediaan mata pencarian untuk merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih holistik dan efektif (Zhang et al., 2024).

Dalam hal ini, penelitian mengenai persepsi *stakeholder* akan fungsi hutan menjadi sangat penting dilakukan, urgensinya adalah untuk memahami bagaimana masyarakat dan pihak terkait memandang fungsi hutan, karena persepsi yang terbentuk akan sangat menentukan tingkat

keterlibatan dan komitmen dalam menjaga kawasan hutan di Desa Kuala Tolam. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis persepsi *stakeholder* terhadap fungsi hutan yang ditinjau dari tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembentukan komitmen bersama dalam upaya menjaga dan mempertahankan kawasan hutan di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan.

## Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2025 di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Kampar. Kegiatan penelitian ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan musyawarah masyarakat di Desa Kuala Tolam dalam pembentukan komitmen dalam menjaga dan mempertahankan kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan wawancara dengan berbagai *stakeholders*. Data yang dikumpulkan mencakup identitas responden serta persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial. Pengambilan data primer dilakukan terhadap 28 responden secara *purposive sampling*. Responden merupakan *stakeholder* yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan anggota kelompok ibu PKK yang dilibatkan dalam pembentukan komitmen untuk menjaga fungsi dan kawasan hutan di Desa Kuala Tolam. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam untuk menggali persepsi mereka terhadap fungsi hutan dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Data sekunder diperoleh dari pihak lain atau dari sumber yang telah diolah sebelumnya, dan digunakan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan penelitian. Data sekunder ini meliputi bahan acuan seperti artikel ilmiah dan sumber relevan lainnya.

Analisis data mengenai persepsi *stakeholder* terhadap fungsi hutan di Desa Kuala Tolam dilakukan menggunakan metode skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, atau pendapat individu maupun kelompok terhadap suatu objek atau fenomena sosial (Saputra & Nugroho, 2017). Responden diminta memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan pada kuesioner dengan skala tertentu, yang kemudian

diolah untuk mendapatkan gambaran tingkat persepsi secara kuantitatif. Tabel 1 merupakan nilai persepsi yang akan diberikan responden terhadap kuesioner yang akan diisi.

**Tabel 1.** Tingkat persepsi Responden

No	Nilai	Tingkat Persepsi Responden
1	5	Sangat Setuju
2	4	Setuju
3	3	Cukup Setuju
4	2	Tidak Setuju
5	1	Sangat Tidak Setuju

Untuk mengetahui nilai disetiap kriteria persepsi pengunjung dilakukan perhitungan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu:

$$T \times Pn$$

Keterangan:

T = Total jumlah responden yang memilih

Pn = Pilihan angka skor Likert

Untuk memasukkan dalam skala likert digunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= 5 \\ \text{Skor terendah} &= 1 \\ \text{Range} &= 5 - 1 = 4 \\ 4 : 5 &= 0,8 \text{ jarak interval antar nilai} \end{aligned}$$

**Tabel 2.** Nilai persepsi Responden

Nilai	Tingkat Persepsi Responden
$\geq 4,6$	Sangat Setuju
3,7 – 4,5	Setuju
2,8 – 3,6	Cukup Setuju
1,9 – 2,7	Tidak Setuju
1 – 1,8	Sangat Tidak Setuju

#### Penentuan Skor Tiap Kelompok Kuesioner

Kuesioner pada penelitian ini terdapat 3 kelompok pertanyaan diantaranya aspek ekonomi, aspek ekologi dan aspek sosial budaya. Adapun nilai skala untuk masing-masing kelompok pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertanyaan setiap aspek adalah 15 pertanyaan} \\ \text{Jumlah nilai terendah} &= 1 \text{ (Skor)} \times 15 \\ \text{(Pertanyaan)} &= 15 \text{ Poin} \\ \text{Jumlah nilai tertinggi} &= 5 \text{ (Skor)} \times 15 \\ \text{(Pertanyaan)} &= 75 \text{ poin} \\ \text{Range} &= 75 - 15 = 60, \\ 60 : 3 &= 20 \end{aligned}$$

**Tabel 3.** Nilai skor tiap kelompok kuesioner

No	Skor	Kategori
1	15-36	Rendah
2	36-56	Sedang
3	$\geq 57$	Tinggi

#### Hasil dan Pembahasan

##### 1. Kedudukan dan Peran Stakeholder dalam Analisis Persepsi Fungsi Hutan di Desa Kuala Tolam

*Stakeholder* memiliki peran penting dalam konteks pengelolaan dan perlindungan hutan di Desa Kuala Tolam. *Stakeholders* memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Peran *stakeholders* terutama dalam memberikan persepsi fungsi hutan merupakan langkah strategis untuk dikaji. Menurut penelitian Fajar dan Kim (2019) keberhasilan pengelolaan hutan juga dipengaruhi oleh partisipasi dan kolaborasi berbagai *stakeholders*, termasuk masyarakat lokal, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, *stakeholder* juga memiliki kepentingan tertentu dalam pengelolaan hutan, sehingga keterlibatan mereka dapat mempercepat terwujudnya implementasi kebijakan (Sentanu dan Kumalasari, 2020). Kepentingan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat berupa kepentingan bersama yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian lainnya, di Kabupaten Buton Utara peran *stakeholder* sebagai aktor yang berinteraksi dalam rangka pengelolaan hasil hutan, seperti pencegahan *illegal logging* dan penegakan hukum (Jayalangi *et.al* 2016).

Dalam penelitian ini, *stakeholder* yang menjadi responden meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan kelompok ibu PKK. Masing-masing kelompok memiliki latar belakang, peran, serta kepentingan yang berbeda, sehingga menghasilkan ragam perspektif mengenai fungsi hutan, baik dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial. Keberagaman perspektif ini memungkinkan analisis persepsi yang lebih komprehensif dan realistik dalam memahami bagaimana hutan dipandang oleh pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung. Persepsi *stakeholders* dapat menjadi penting ketika, *stakeholders* mampu berperan dalam berbagai aktor seperti *key player*, *context setter*, *subject* dan *crowds* dalam sebuah pengelolaan hutan, peran ini dapat dikendalikan dan dioptimalkan jika hubungan serta aturan yang mengatur interaksi antar *stakeholder* diintegrasikan secara baik, sehingga performa masing-masing *stakeholder* dapat mendukung keberhasilan pengelolaan hutan (Prasetya *et.al* 2017). *Stakeholder* juga berperan sebagai pengambil keputusan yang dapat mendorong ataupun menghambat pelaksanaan komitmen perlindungan hutan. Ketika persepsi yang dimiliki positif dan selaras dengan prinsip

kelestarian, *stakeholders* dapat menjadi penggerak yang memperkuat kesadaran kolektif dan komitmen masyarakat. *Stakeholder* juga dapat mencerminkan kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan hutan, serta sebagai penggerak langsung maupun sebagai pendukung kebijakan (Hidayani *et.al* 2017).

Selain itu, perlibatan *stakeholder* sejak tahap awal penelitian merupakan bagian dari pembentukan komitmen bersama untuk menjaga fungsi dan kawasan hutan di Desa Kuala Tolam, serta akan dibentuk Tim Patroli Hutan. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal persepsi masyarakat akan fungsi hutan sangat diperlukan untuk memahami nilai penting hutan dari sudut pandang masyarakat, mengidentifikasi potensi dukungan dari masyarakat, serta merumuskan strategi kolaboratif yang dapat memperkuat perlindungan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

## 2. Persepsi Stakeholders terhadap Fungsi Hutan

Persepsi *stakeholder* yang menjadi responden dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai fungsi hutan dari tiga aspek utama, yaitu fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Ketiga aspek ini dipilih karena mewakili aspek keberlanjutan pengelolaan hutan yang saling terkait. Fungsi ekonomi mencakup pandangan *stakeholder*

terhadap potensi hutan sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan, baik melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara berkelanjutan. Fungsi ekologi meliputi peran hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mengatur tata air, melindungi keanekaragaman hayati, serta mencegah degradasi lahan. Sementara itu, fungsi sosial mengacu pada nilai-nilai kultural, historis, dan identitas masyarakat yang melekat pada keberadaan hutan, termasuk peran hutan sebagai ruang untuk kegiatan adat dan penguatan kohesi sosial. Berikut ini dijelaskan bagaimana persepsi *stakeholder* Desa Kuala Tolam dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial

### 2.1 Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi berkaitan dengan nilai dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari hutan baik secara langsung dan tidak langsung. Hasil persepsi *stakeholders* terhadap aspek ekonomi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persepsi *stakeholders* terhadap aspek ekonomi hutan di Desa Kuala Tolam berada pada kategori "Setuju" untuk seluruh indikator yang diukur. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat dan pihak-pihak terkait memandang keberadaan hutan sebagai aset penting yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian lokal.

**Tabel 4.** Aspek Ekonomi

No	Indikator Aspek Ekonomi	Total Skor	Rata-rata	Keterangan
1	Keberadaan hutan memberikan pendapatan bagi masyarakat	95	4,54	Setuju
2	Tingkat perekonomian masyarakat semakin meningkat dengan adanya hutan.	87	4,21	Setuju
3	Hutan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	82	4,07	Setuju
4	Keberadaan hutan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.	85	4,14	Setuju
5	Hutan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	81	4,00	Setuju
6	Masyarakat merasakan manfaat langsung dari hasil hutan kayu.	88	4,25	Setuju
7	Masyarakat merasakan manfaat dari hasil hutan non-kayu.	86	4,18	Setuju
8	Hutan menjadi sumber penyediaan tumbuhan obat-obatan.	83	4,11	Setuju
9	Hutan dapat dimanfaatkan secara tidak langsung melalui jasa lingkungan.	84	4,11	Setuju
10	Keberadaan hutan mendukung pengembangan wisata alam.	86	4,18	Setuju
11	Hutan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.	84	4,14	Setuju
12	Masyarakat terbantu kehidupannya dengan adanya hutan.	84	4,11	Setuju
13	Hutan menunjang siklus kehidupan yang berdampak pada keberlanjutan ekonomi.	76	3,82	Setuju
14	Pemanfaatan hasil hutan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.	87	4,21	Setuju
15	Masyarakat memahami bahwa hutan tidak dapat dialihfungsikan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.	83	4,07	Setuju

Berdasarkan Tabel 4, indikator dengan skor rata-rata tertinggi adalah “*Keberadaan hutan memberi pendapatan bagi masyarakat*” dengan nilai 4,54. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari peran penting hutan sebagai sumber pendapatan. Temuan ini sejalan dengan indikator lainnya, yaitu “*Masyarakat merasakan manfaat langsung dari hasil hutan kayu*” dengan rata-rata 4,25, serta “*Tingkat perekonomian masyarakat semakin meningkat dengan adanya hutan*” dengan rata-rata 4,21. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Maimunat et. al (2023) pada komunitas masyarakat di Desa Sungai Melayu, bahwa hutan di sekitar desa memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada masyarakat seperti sumber makanan, kayu, dan resin, serta manfaat tidak langsung seperti pengendalian erosi dan banjir yang mendukung kehidupan masyarakat lokal. Penelitian yang sama juga dilakukan Rasolofoson et.al (2020) terkait dengan manfaat yang diberikan dari produk hasil hutan, baik makanan maupun non-makanan seperti kayu dan hasil non-hutannya, berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat di negara berkembang. Produk hasil hutan ini digunakan untuk konsumsi langsung maupun dijual untuk memperoleh pendapatan. Adanya bantuan dan program, seperti program sosial hutan juga dapat mendukung mendukung keberlanjutan

mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan (Astaman et.al 2020).

Pada indikator lainnya, seperti seperti pemanfaatan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari, peningkatan kesejahteraan, serta penyediaan lapangan pekerjaan, memiliki skor di kisaran 4,00–4,18. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hutan, baik melalui hasil hutan kayu maupun non-kayu seperti tumbuhan obat-obatan, udara bersih dan lingkungan yang asri. Bahkan indikator terkait pemahaman bahwa hutan tidak dapat dialihfungsikan (4,07) menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan fungsi ekonomi hutan melalui perlindungan kawasan. Dengan demikian persepsi *stakeholders* terhadap fungsi ekonomi hutan di Desa Kuala Tolam cenderung setuju bahwa hutan memberikan manfaat ekonomi.

## 2.2 Aspek Sosial

Dalam pengelolaan hutan lestari, aspek sosial dalam fungsi hutan menjadi hal yang penting untuk diupayakan, agar terimplementasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aspek sosial dapat mencakup peran hutan sebagai tempat tinggal, sumber mata pencaharian dan nilai budaya bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal. Hasil persepsi masyarakat Desa Kuala Tolam dalam aspek sosial dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Aspek sosial

No	Indikator Aspek Sosial	Skor	Rata-rata	Keterangan
1	Hutan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat	94	4,36	Setuju
2	Hutan mempunyai peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	84	4,00	Setuju
3	Hutan mendukung keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat.	86	4,07	Setuju
4	Hutan melestarikan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.	86	4,07	Setuju
5	Hutan masih dikelola dengan mengacu pada adat istiadat.	85	4,04	Setuju
6	Adat istiadat dan budaya masyarakat tetap dipertahankan dalam pengelolaan hutan.	84	4,00	Setuju
7	Pemangku adat berperan aktif dalam menjaga & melestarikan hutan.	90	4,21	Setuju
8	Masyarakat dilibatkan langsung dalam kegiatan pelestarian hutan.	93	4,32	Setuju
9	Masyarakat turut menjaga keamanan dan ketertiban kawasan hutan.	90	4,21	Setuju
10	Masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap pemanfaatan hasil dan fasilitas hutan.	91	4,25	Setuju
11	Pengelolaan hutan adat berjalan baik dengan kerja sama multi pihak.	84	4,00	Setuju
12	Pengelolaan hutan membutuhkan dukungan eksternal dari lembaga atau instansi lain.	83	3,96	Setuju
13	Fasilitas pengelolaan hutan diperbaiki & ditingkatkan oleh pengelola.	88	4,14	Setuju
14	Hutan berperan dalam mencegah konflik sosial melalui pengaturan hak dan kewajiban masyarakat.	86	4,07	Setuju
15	Masyarakat berkomitmen melestarikan hutan untuk generasi mendatang	93	4,32	Setuju

Tabel 5 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, persepsi *stakeholders* terhadap aspek sosial kawasan hutan di Desa Kuala Tolam berada pada kategori “Setuju” untuk semua indikator yang dinilai. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemahaman dan pengakuan dari stakeholders selaku masyarakat yang berdampingan dengan hutan, bahwa hutan memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai sosial, budaya dan kearifan lokal. Menurut penelitian Khairi (2023) bagi masyarakat yang tinggal dipandang sebagai ibu yang memberikan penghidupan bagi Masyarakat sekaligus simbol eksistensi dalam kesatuan masyarakat. Selain itu menurut penelitian Martapani *et.al* (2021) aspek sosial dalam pengelolaan hutan juga memberikan dampak bagi masyarakat dalam peningkatan pengetahuan, resolusi konflik dan penguatan budaya.

Indikator aspek sosial yang memiliki nilai tertinggi adalah *hutan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat* dengan rata-rata 4,36 yang menunjukkan bahwa keberadaan hutan sudah dirasakan manfaatkan secara keseluruhan oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, masyarakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup namun juga memelihara dan mempertahankan hutan tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa hutan tidak hanya menjadi sumber daya alam, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pelestarian identitas budaya (Pranawa & Hamid, 2023). Indikator lain yang memperoleh skor tinggi adalah *masyarakat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pelestarian hutan* dengan skor 4,32. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian hutan bisa berupa partisipasi aktif masyarakat seperti partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga dan

partisipasi sosial (Pelu *et.al* 2024). Indikator lainnya yang memiliki rata-rata tinggi adalah *komitmen masyarakat dalam menjaga hutan untuk generasi yang akan datang* yang menunjukkan kesadaran dan pemahaman *stakeholder* bahwa hutan buka kebutuhan saat ini, namun juga merupakan aset yang diwarisakan secara lestari kepada anak dan cucu dimasa yang akan datang.

Selain itu kearifan lokal, adat istiadat sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan, karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem pengawasan berbasis masyarakat, serta memperkuat kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi yang baik antara berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah dan masyarakat adat, mendukung keberhasilan pelestarian dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Rahman dan Jalaluddin, 2022). Hasil persepsi ini diharapkan tumbuh dalam masyarakat di Desa Kuala Tolam sehingga mampu menjaga fungsi dan kawasan hutan melalui nilai-nilai sosial budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

### 2.3 Aspek Ekologi

Aspek ekologi berkaitan dengan persepsi *stakeholder* terhadap fungsi hutan dalam menjaga lingkungan. Secara umum, persepsi *stakeholder* di Desa Kuala Tolam menunjukkan persepsi yang positif terhadap fungsi ekologi hutan. Seluruh indikator memperoleh skor rata-rata di atas 4 (kategori *Setuju*), yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan kuat bahwa hutan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Indikator aspek ekologi disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Aspek Ekologi

No	Indikator Aspek ekologi	Skor	Rata-rata	Keterangan
1	Hutan mendukung ketersediaan air.	89	4,18	Setuju
2	Hutan berperan penting dalam tata kelola air.	88	4,14	Setuju
3	Hutan membantu menjaga kualitas air tanah dan air permukaan.	90	4,21	Setuju
4	Hutan membantu menurunkan risiko banjir.	84	4,00	Setuju
5	Hutan menjadi habitat bagi hewan dan tumbuhan.	93	4,32	Setuju
6	Hutan melestarikan keanekaragaman hayati.	91	4,25	Setuju
7	Hutan memberikan hasil berupa kayu dan non-kayu	89	4,18	Setuju
8	Hutan menyediakan tempat berkembang biak bagi satwa liar.	90	4,21	Setuju
9	Hutan dapat mencegah terjadinya bencana alam.	92	4,29	Setuju
10	Hutan dapat membantu tingkat kesuburan tanah & mencegah erosi.	93	4,32	Setuju
11	Hutan mampu menahan angin dan longsor.	90	4,21	Setuju
12	Hutan membantu menyerap polusi udara.	92	4,29	Setuju
13	Hutan menghasilkan jasa lingkungan (penyimpan karbon, penyejuk udara, dll).	91	4,25	Setuju
14	Hutan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.	89	4,18	Setuju
15	Hutan menjaga kestabilan iklim lokal dan global.	90	4,21	Setuju

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan adanya pengakuan bersama dari para *stakeholder* terhadap aspek ekologi, yaitu pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Masyarakat tidak hanya melihat hutan sebagai sumber ekonomi melalui kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), tetapi juga menyadari manfaat ekosistem yang lebih luas, seperti pengaturan air, pencegahan bencana, penyediaan habitat, hingga pengendalian iklim. Desa Kuala Tolam yang berada di Provinsi Riau, eksis dengan ekosistem gambut, sehingga persepsi tentang fungsi ekologi menjadi semakin penting karena kerusakan lingkungan terbukti menimbulkan penurunan kualitas air, kerusakan tanah, kebakaran, dan kabut asap (Chang *et al.*, 2023).

Penilaian *stakeholder* terhadap beberapa indikator menunjukkan bahwa salah satu indikator dengan nilai rata-rata tinggi adalah peran hutan dalam meningkatkan kesuburan tanah dan mencegah erosi, dengan skor rata-rata 4,32. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan *stakeholder* dan masyarakat sangat bergantung pada kualitas tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian, sehingga keberadaan hutan dianggap penting untuk mendukung produktivitas lahan pertanian. Indikator lainnya adalah peran hutan sebagai habitat bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, yang juga mendapatkan nilai rata-rata 4,32. Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa fungsi hutan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga tempat tinggal bagi keanekaragaman hayati flora dan fauna.

Indikator lainnya menunjukkan nilai rata-rata 4,21-4,32 menunjukkan bahwa masyarakat menyadari hutan memiliki fungsi dalam menjaga kualitas air dan tanah, memberikan fungsi perlindungan dan membantu dalam menyerapkan karbon. Penanaman pengetahuan ekologi tradisional tentang sumber daya hutan harus tetap dilakukan agar kawasan hutan tetap terjaga, seperti hubungan hutan dengan masyarakat dan praktik pengetahuan ekologi tradisional perlu di lestarikan (Siburian, 2025). Sebagai contoh kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan hendaknya diturunkan secara turun temurun, khususnya dalam penjagaan dan keberlangsungan hutan. Hal ini diperlukan untuk dapat menumbuhkan komitmen kolektif untuk menjaga dan melestarikan hutan. Kesadaran ini diharapkan juga mendorong penguatan sistem pengawasan, mencegah aktivitas kerusakan hutan dan menjadi landasan penting dalam mewujudkan kolaborasi dan strategi dalam mempertahankan fungsi dan kawasan hutan.

### 3. Persepsi Masyarakat Secara Keseluruhan

Berdasarkan Tabel 7 persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi Hutan Hutan di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan dinilai berdasarkan 3 aspek yakni ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Hasil penilaian menunjukkan bahwa aspek sosial memperoleh skor tertinggi sebesar 90,06, diikuti oleh aspek ekologi dengan skor 87,80, dan aspek ekonomi sebesar 84,73. Nilai-nilai tersebut secara keseluruhan mencerminkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang sangat positif terhadap fungsi dan keberadaan hutan di Hutan Desa Kuala Tolam. Penelitian yang saja juga ditemukan di Hutan Adat Ghimbo Pomuan, bahwa masyarakat memiliki persepsi hutan yang tinggi terhadap hutan ada yang berada disekitar mereka (Frans *et.al* 2024).

**Tabel 7. Persepsi Masyarakat Kuala Tolam**

No	Aspek Penilaian	Skor	Keterangan
1	Ekonomi	84,73	Tinggi
2	Ekologi	87,80	Tinggi
3	Sosial	90,06	Tinggi

Aspek sosial memperoleh skor tertinggi, yang mengindikasikan bahwa hutan adat tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya yang mengandung nilai kebersamaan, identitas adat, dan warisan leluhur. Keterikatan sosial ini menjadi modal penting bagi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan dari ancaman degradasi maupun perubahan fungsi lahan. Selain itu, tingginya skor pada aspek ekologi menunjukkan bahwa *stakeholder* menyadari peran penting hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem lokal. Hutan dipahami berfungsi sebagai penyangga kehidupan, pelindung sumber air, serta habitat keanekaragaman hayati yang bernilai ekologis tinggi. Sementara aspek ekonomi, meskipun nilainya sedikit lebih rendah, tetap menunjukkan bahwa masyarakat mengakui kontribusi hutan terhadap sumber penghidupan, namun dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, persepsi tinggi dari masyarakat pada tiga aspek ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitment penuh untuk tetap mempertahankan fungsi dan keberadaan hutan di Desa Kuala Tolam. Penelitian yang saja juga ditemukan di Hutan Adat Ghimbo Pomuan, bahwa masyarakat memiliki persepsi hutan yang tinggi terhadap hutan ada yang berada disekitar mereka (Frans *et.al* 2024).

## Kesimpulan

Persepsi *stakeholder* di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, menunjukkan bahwa hutan memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kawasan hutan. Ketiga aspek yang dinilai—ekonomi, sosial, dan ekologi mendapatkan persetujuan dari semua *stakeholder*. Dalam aspek ekonomi, hutan dianggap sebagai sumber pendapatan yang vital, baik melalui hasil hutan kayu maupun non-kayu. Secara sosial, hutan memiliki nilai kearifan lokal, adat istiadat, dan

dianggap sebagai warisan yang perlu dijaga untuk generasi mendatang. Sementara itu, dalam aspek ekologi, terdapat kesadaran yang tinggi mengenai peran hutan dalam menjaga kualitas tanah dan air, mencegah erosi, menyerap karbon, serta sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati. Persepsi positif ini diharapkan dapat menjadi modal sosial yang memperkuat komitmen, pengambilan keputusan, dan implementasi di lapangan untuk mempertahankan fungsi dan kawasan hutan di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan.

## Daftar Pustaka

- Astaman, P., Hikmah, A. N., Dassir, M., & Nadirah, S. (2024). Natural resource capital for sustainable livelihoods in social forestry areas: A case study from Enrekang Regency. *Tarjih: Agribusiness Development Journal*, 4(2), 197–208.  
<https://doi.org/10.47030/tadj.v4i02.875>
- Báliková, K., Mederly, P., Špulerová, J., & Izakovičová, Z. (2020). Stakeholders' perception of the forest–water nexus: A case study from Slovakia. *Forests*, 11(1), 12.  
<https://doi.org/10.3390/f11010012>
- Chang, T. Y., Lu, H. P., Luor, T. Y., & Chang, P. W. (2023). Correction: Weighting of Firefighting Turnout Gear Risk Factors According to Expert Opinion (Sustainability, (2022), 14, (7040), 10.3390/su14127040). *Sustainability (Switzerland)*, 15(8).  
<https://doi.org/10.3390/su15086470>
- Fahyumi Rahman, & Muzani Jalaludin. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 14(1), 51–60. <https://doi.org/10.24259/jhm.v14i1.1439>
- Fajar, N. C., & Kim, J. S. (2019). The impact of community-based forest management on local people around the forest: Case study in Forest Management Unit Bogor, Indonesia. *Journal of Forest and Environmental Science*, 35(2), 102–114.  
<https://doi.org/10.7747/JFES.2019.35.2.102>
- Faße, A., Winter, E., & Grote, U. 2014. Bioenergy and rural development: The role of agroforestry in a Tanzanian village economy. *Ecological Economics*, 106, 155–166. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.07.018>
- Frans, J. G., Suwarno, E., & Lestari, I. (2024). Persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi hutan adat Ghimbo Pomuan di Desa Koto Perambahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 6(2), 33–44.
- Hudiyani, I., Purnaningsih, N., Asngari, P. S., & Hardjanto, H. (2017). An Analysis of Stakeholders in Agroforestry Community Forest Management in Wonogiri Regency, Central Java Province, Republic of Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 32(3), 164–185.
- Jayalangi, L. O. S., Irianto, J., & Putro, R. H. (2016). Koalisi stakeholder dalam penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam: Studi di kawasan hutan alam Kabupaten Buton Utara. *Jejaring Administrasi Publik*, 8(2), 906–916.
- Khairi, M. (2023) “Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”, *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(3), 217–232.  
<https://doi.org/10.31571/sosial.v10i3.6721>
- Maimunah S, Simamora TI, Bhatta KP, Prahesty DY, Samsudin YB, Fauzi A, Amin AM, Fatchurrohman A, Rahman SA. (2023). Valuing Forest Resources by the Local Community in Sungai Melayu, West Kalimantan. *Biodiversity Online J.* 4(2). BOJ. 0005.  
<https://doi.org/10.31031/BOJ.2023.04.000585>
- Medrilzam, M., Smith, C., Aziz, A. A., Herbohn, J., & Dargusch, P. (2017). Smallholder farmers and the dynamics of degradation of peatland ecosystems in Central Kalimantan, Indonesia. *Ecological Economics*, 136, 101–113. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.02.017>
- Novarina, D., Supriatna J., Santoso, I., Karuniasa M. (2024) Peatland Transformation: Land Cover Changes and Driving Factors in the Kampar Peninsula (1990–2020). *Land*, 13(10), 1-20.  
<https://doi.org/10.3390/land1310699>
- Ótalora, G., Carmen, M., López-marín, J., Varó,

- P., & Francisco, M. (2018). *Scientia Horticulturae* Effects of foliar nitrogen fertilization on the phenolic, mineral, and amino acid composition of escarole (*Cichorium endivia* L. var. *latifolium*). *Scientia Horticulturae*, 239, 87-92.  
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.05.031>
- Pelu, S., Tjoa, M., & Imlabla, W. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Persetujuan Izin Perhutanan Sosial Di Desa Hukurila. *Jurnal Agrosilvopasture-Tech*, 3(1), 1-5.  
<https://doi.org/10.30598/j.agrosilvopasture-tech.2024.3.1.1>
- Pranawa, G. G., & Hamid, I. (2023). Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 10–19.
- Prasetia, D. A., Hardjanto, & Hero, Y. (2017). Analisis pemangku kepentingan dalam pola kemitraan dan pola swadaya pada pengelolaan hutan rakyat. *Media Konservasi*, 22(3), 293–302.
- Rasolofoson RA, Ricketts TH, Jacob A, Johnson KB, Pappinen A and Fisher B. (2020). Forest Conservation: A Potential Nutrition-Sensitive Intervention in Low- and Middle-Income Countries. *Front. Sustain. Food Syst.* 4:20, 1-10.  
<https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00020>
- Rudjiman dan D. T. Adriyanti. (2002). Identification manual of Shorea species. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sardjono, M. A., Djogo, T., & Arifin, H. S. (2003). Klasifikasi dan Pola Kombinasi Komponen Agroforestri. *Klasifikasi Dan Pola Kombinasi Komponen Agroforestri*, 2 (World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, Indonesia).
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Kumalasari, K. (2020). Analisis kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan UB Forest berbasis hutan pendidikan untuk mendukung keberlanjutan sistem *agroforestri*. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, 22(2), 122–132.  
<https://doi.org/10.37303/lihitaprajna.v22i2.162>
- Siburian, R. (2023). Akses dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(3).  
<https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.727>
- SPLP-BRGM. 2023. Profil Desa Kuala Tolam. Pekanbaru, Riau.
- Zhang, Y., He, Y., & Zhang, J. (2024). The perception of stakeholders on the forest ecosystem services: National parks in China and Canada. *Forests*, 15(2), 384.  
<https://doi.org/10.3390/f15020384>